

MENGGUGAT KEGAGALAN BELAJAR

Pengaruh Pilihan Individu dan Masyarakat terhadap Kerusakan Lingkungan

(Petikan dari buku "COLLAPSE: How Societies Choose to Fail or Survive" – Jared Diamond, 2005. London: Penguin Books)¹

Kegagalan berbagai negara untuk dapat menghindari atau mengatasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup mencakup dimensi yang begitu luas. Keputusan atas pilihan-pilihan individu dan keputusan atas pilihan-pilihan bersama sangat menentukan bagaimana manfaat sumberdaya alam dapat didaya-gunakan secara adil dan berkelanjutan. Peradaban manusia ribuan tahun yang lalu telah mengkhabarkan dan memberi pelajaran penting tentang keberhasilan dan kegagalan keputusan atas pilihan-pilihan tersebut, namun sangat sedikit yang dapat menggunakannya. Pertanyaan yang diajukan kemudian adalah: "Kalau demikian, apa masalah terpenting terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan kependudukan di dunia saat ini?" Jawabannya adalah: "Masalah terpenting tersebut adalah munculnya kerangka pikir yang menanyakan adanya masalah terpenting tersebut" (p. 498).

Diamond memberi penekanan atas permasalahan kerangka pikir – menurut pandangan saya – adalah hal terpenting yang diajukannya. Sebab, mengubah kerangka pikir adalah "tindakan nyata" untuk tidak lagi menggunakan sistem nilai, aliran politik maupun kerangka pembangunan yang memang sudah waktunya ditinggalkan. Setidaknya hal demikian yang telah dilakukan oleh Inggris, Perancis, Amerika, Australia, atas upayanya untuk mengatasi masalah mereka dan berhasil, setidaknya untuk saat ini (p. 433).

Diamond memulai analisisnya terhadap kegagalan belajar berbagai bangsa akibat lemahnya para pengambil keputusan memahami adanya kondisi sosial yang kompleks (*complex societies*). Keputusan yang terpusat, aliran informasi yang tinggi, koordinasi yang tinggi, instruksi oleh kewenangan formal, dan pemusatan sumberdaya adalah hal-hal yang menjadi perhatiannya (p. 420). Adanya *complex societies* tanpa disertai adanya kemampuan kelembagaan untuk mengatasinya hampir selalu berakhir dengan kegagalan. Ini juga yang terjadi di Indonesia. Aspek-aspek kelembagaan senantiasa dianggap "given", dianggap mampu beradaptasi dengan *complex societies* yang dihadapinya, padahal tidak. Bahkan sebaliknya, kebijakan dan program pembangunan menghasilkan faktor-faktor yang menumbuhkan terjadinya *complex societies*. Kajian kelembagaan di 11 kabupaten/kota di Propinsi Riau 2006 terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, misalnya, menunjukkan hal itu. Keputusan bukan hanya terpusat tetapi memerlukan prosedur yang panjang, pedoman umum tidak dikuasai oleh pelaksana, informasi dari pusat ke daerah tidak sama, inovasi yang benar berdasarkan kondisi di lapangan disalahkan oleh pedoman dan petunjuk kerja, akhirnya milyaran rupiah Dana Reboisasi tidak tepat sasaran.

"Kemampuan kelembagaan" sebagai kata benda, dengan demikian, menjadi unsur utama baik bagi individu, masyarakat, maupun lembaga-lembaga. Rendahnya kemampuan mengakibatkan tiga jenis kegagalan yaitu: gagal mengantisipasi datangnya masalah,

¹ Bahan diskusi pembahasan buku di Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, 2007, di Jakarta

gagal mempersepsikan masalah dengan benar, dan gagal memecahkan masalah yang sesungguhnya (p. 421). Dari ketiga jenis kegagalan tersebut yang terpenting untuk ditelaah lebih jauh adalah gagal mempersepsikan masalah dengan benar, yang berakibat gagal mengantisipasi datangnya dan gagal memecahkannya. Sebagaimana diungkap dalam berbagai referensi kebijakan publik, kesalahan utama bagi pengambil keputusan adalah salah dalam menentukan masalah. Inilah yang disebut sebagai kesalahan tipe ketiga, *problem unsolving*. Panca-indra bahkan hampir mustahil dapat menetapkan masalah, sebagaimana dokter memerlukan diagnosa dengan berbagai alat khusus untuk mengetahui sumber penyakit. Misalnya, ketika disebutkan bahwa pendapatan per kapita kabupaten-kabupaten di Jawa bagian selatan lebih tinggi daripada di bagian utara – yang terungkap dalam suatu rapat oleh Menko Perekonomian, sedangkan ada kenyataan bahwa Jawa bagian utara mempunyai infrastruktur ekonomi lebih baik, maka apa sebenarnya masalah kemiskinan di Jawa?

Sejumlah faktor diungkap untuk menjelaskan kegagalan tersebut di atas. Antara lain disebutkan dari yang paling sederhana namun menghadirkan masalah besar yaitu, banyaknya kejadian-kejadian penting yang sudah dan mudah dilupakan. Juga adanya analogi yang keliru, secara harfiah masalah tidak dapat dilihat, *creeping normalcy*, serta *landscape amnesia* menjadi sejumlah keadaan yang tidak memungkinkan masalah diantisipasi datangnya (p. 422 – 426). Juga ditelaah dengan contoh kejadian-kejadiannya bagaimana *rational behavior*, *selfish*, *irrational behavior*, *religious value*, yang dikembangkan dengan istilah-istilah *persistence in error*, *wooden-headedness*, *mental standstill/ stagnation*, *sunk-cost effect*, *cword psychology*, *groupthink*, dan *psychological denial* menjadi penghambat untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi (p. 427 – 436).

Sebagaimana seorang dokter yang sedang melakukan diagnosa penyakit pasiennya, masalah yang tidak terlihat dan memang perlu analisis secara mendalam untuk menetakannya, hal demikian itu seringkali diabaikan. Apalagi apabila kejadiannya bukan dalam waktu cepat. Terjadinya *creeping normalcy* dan *landscape amnesia* adalah ketika dilihat perkembangan cukup lama dari kerusakan hutan, perubahan tata kota, perumahan di bantaran sungai, dan lain-lain, yang tidak disikapi ketika awal terjadinya masalah. Sebaliknya, ketika sudah terjadi masalah – banjir, longsor, kekeringan, meledaknya hama, penurunan kesuburan tanah, busung lapar, maka kata-kata ”terlanjur” dengan mudah diucapkan sebagai perwujudan *sunk-cost effect*. Politisi yang ”usia” tanggungjawabnya hanya lima tahun, juga akan cenderung tidak peduli dengan rusaknya hutan lindung, misalnya. Karena dampaknya dapat terjadi sepuluh tahun kemudian bahkan lebih. Mungkin generasi kita juga akan ikut serta merusak sumberdaya alam, toh dampak buruknya akan terjadi setelah kita mati.

Setelah kejadian banjir, kekeringan, busung lapar dan lain lain berlangsung, *rational behavior* biasanya mendominasi upaya untuk memecahkan kejadian-kejadian tersebut. Rasio yang kebenarannya hanya di dalam pikiran seringkali mendominasi ide munculnya kebijakan. Dikatakan oleh Diamond, dalam proses pembuatan kebijakan juga terwujud *cword psychology*, *groupthink*, *psychological denial* yang pada prinsipnya tidak lagi dapat mencerna apa yang sebenarnya terjadi dan oleh karena itu gagal menetapkan kebijakan secara tepat. Ironinya, *rational behavior* maupun *irrational behavior* bukan hanya akibat kondisi yang mendesak, tetapi juga terjadi dalam waktu yang panjang.

Keduanya hidup ditengah-tengah struktur kekuasaan yang secara legal harus ada. Artinya, keduanya bagian yang tidak terpisahkan dari legalitas itu sendiri, yang membawa implikasi selalu akan disuguhkannya kebijakan *second best*, dan akan senantiasa membawa masalah dari waktu ke waktu, mungkin sampai akhir zaman.

Dari kondisi itulah yang oleh Diamond diungkapkan selusin apa yang disebutnya sebagai *one-liners* (p. 503 – 514). Yakni simplifikasi keyakinan tunggal atas *common sense* yang umum diyakini tetapi tidak senantiasa benar, akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat dalam implementasinya. Misalnya anggapan bahwa teknologi dapat mengatasi masalah, jika sumberdaya tertentu habis dapat pindah kepada sumberdaya lain, dengan ukuran pembangunan tertentu (misal GNP) maka selesailah persoalan, dan lain lain. Berdasarkan kondisi dan sikap-sikap di ataslah maka kerusakan habitat alami, bahan pangan, spesies, kerusakan tanah, kelangkaan energi, kurangnya air bersih, pencemaran, adanya spesies asing, rusaknya lapisan ozone, dan dampak buruk bagi lingkungan secara keseluruhan terjadi.

Buku ini telah selesai mengungkapkan makna kejadian yang lalu dan memberi pelajaran bagi pembacanya. Pada saat kita tahu bahwa setiap orang dalam kehidupannya sebenarnya belajar – baik disadari atau tidak – dalam buku ini dapat ditemukan jawabannya. Diamond berulang kali dalam buku ini mengupas bagaimana posisi seseorang sebagai individu harus mensikapi persoalan-persoalan di atas, termasuk sikap optimis yang dipilihnya setelah seorang kawannya menanyakannya terhadap perkembangan kerusakan lingkungan hidup di bumi ini. Dari situ, sekaligus dapat ditemukan kelemahan buku ini – jika harus diungkapkan – antara lain kurangnya sintesis terhadap masalah-masalah keputusan kelompok yang harus diperbaiki, agar mendapat gambaran lebih jelas bagaimana kelemahan kelembagaan terjadi dan sebaliknya fungsi kelembagaan dapat dipertahankan.

Sebagai negara mega-(bio)diversity, juga dengan tingginya keragaman karakteristik sosial budaya, dengan bentang alam dari Sabang hingga Merauke, maka kondisi *complex societies* adalah kondisi *inherent* bagi Indonesia. Dari buku ini dapat dipertegas masa depan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Indonesia melalui kegagalan kelembagaan pemerintahan yang justru semakin meningkatkan *complex societies*, sistem pendidikan yang semakin mengkotak-kotakkan kerangka pikir dan menonjolkan *rational behavior*, kebudayaan yang cenderung melindungi *irrational behavior*, serta sistem politik yang terus mengumbar kepentingan jangka pendek. Mungkin kita tidak akan gagal belajar, tetapi belum mau belajar. Namun, sebagaimana pesan Diamond, sikap optimis untuk mampu memecahkan masalah lebih baik daripada frustrasi melihat keadaan ■

Hariadi Kartodihardjo